

475

Perkembangan Perekonomian Dunia dan Dampaknya pada Pembangunan Nasional

Rustian KAMALUDDIN*

Perkembangan perekonomian dunia sangat besar pengaruhnya pada negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Oleh karena itu, dalam meninjau perkembangan perekonomian suatu negara terutama negara berkembang seperti Indonesia, perlu ditinjau terlebih dulu perkembangan perekonomian dunia dan kaitannya dengan perekonomian nasional negara yang bersangkutan. Dalam hubungan ini, keadaan perekonomian dunia dicerminkan dalam besarnya PDB (produk domestik bruto) negara-negara dan besarnya perdagangan antarnegara secara keseluruhannya.

Namun demikian, untuk menyederhanakan pembahasan, para analis dewasa ini pada dasarnya cenderung menafsirkan perekonomian dunia sebagai ekonomi dari negara-negara OECD (the Organisation for Economic Cooperation and Development) yang terdiri dari 24 negara anggota, yaitu sebanyak 21 negara Barat serta Jepang, Australia dan Selandia Baru. Bahkan seringkali pula perekonomian dunia diartikan sebagai perekonomian tujuh negara paling dominan dalam OECD itu yang tergabung dalam kelompok tujuh negara maju yang dikenal sebagai Kelompok Tujuh (Group of Seven) yaitu Amerika Serikat, Jepang, Jerman Barat, Prancis, Inggris, Italia dan Kanada.¹

Dalam hubungan dengan itu, sekarang memang perkembangan kelompok tujuh negara industri maju itu sudah mencerminkan perekonomian utama dunia, karena selain mereka mempunyai PDB yang tertinggi, juga memegang peranan yang paling besar dalam perdagangan dunia. Menurut data Bank Dunia

*Penulis adalah Guru Besar dalam Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan dan sekarang menjabat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

¹Lihat juga Mohammad Sadli, "Perkembangan Ekonomi Internasional" yang ditulis sebagai Background Information untuk Panel Diskusi Kompas tanggal 15-16 Mei 1986.

(*World Bank Atlas*, 1986) di luar Uni Soviet yang tidak tersedia datanya, ketujuh negara Group of Seven itu masing-masing memang mempunyai PDB yang paling besar di dunia dengan urutan dari yang terbesar berturut-turut (1984): Amerika Serikat (US\$3.670 milyar), Jepang (US\$1.248 milyar), Jerman Barat (US\$679 milyar), Prancis (US\$543 milyar), Inggris (US\$481 milyar), Italia (US\$367 milyar) dan Kanada (US\$331 milyar). PDB negara-negara lainnya berada di bawah angka ini, yaitu mulai dari RRC sebesar US\$318 milyar, Brazilia sebesar US\$227 milyar dan seterusnya. Sebagai bahan perbandingan dapat dikemukakan bahwa PDB Indonesia pada tahun yang sama berjumlah sebesar US\$85 milyar. Dapat ditambahkan bahwa jika dihitung dari 16 negara yang mempunyai PDB lebih besar dari US\$100 milyar, ternyata jumlah PDB dari negara-negara anggota Kelompok Tujuh itu mencapai sebesar US\$7.319 milyar atau 81,9% dari pada total keseluruhannya yang berjumlah sebesar US\$8.938 milyar.

Selanjutnya jika ditinjau mengenai perdagangan antarnegara, ternyata ketujuh negara industri maju itu juga lebih kentara peranannya. Dari data Bank Dunia (*World Development Report*, 1986) dapat dihitung bahwa selain Uni Soviet yang menduduki posisi nomor 6, maka ketujuh negara industri maju itu menempati kedudukan yang teratas. Pada tahun 1984 jumlah nilai perdagangan (ekspor plus impor) dari ketujuh negara industri maju tersebut dari yang terbesar berturut-turut: Amerika Serikat (US\$304 milyar), Inggris (US\$200 milyar), Prancis (US\$197 milyar), Kanada (US\$158 milyar) dan Italia (US\$155 milyar). Jumlah nilai perdagangan negara-negara lainnya berada di bawah angka itu (kecuali Uni Soviet sebesar US\$172 milyar), yaitu mulai dari Belanda (US\$128 milyar), Belgia (US\$106 milyar) dan seterusnya. Dan sebagai bahan perbandingan jumlah nilai perdagangan Indonesia pada tahun yang sama adalah sebesar US\$36 milyar serta menduduki posisi ke-21 di antara negara-negara di dunia. Dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa pada tahun 1984 itu jumlah nilai perdagangan ekspor dan impor dari ketujuh negara industri maju itu adalah sebesar US\$1.892 milyar atau 41,2% dari jumlah nilai perdagangan antarnegara di dunia secara keseluruhannya yang berjumlah sebesar US\$4.597 milyar).

Dengan demikian, baik dari data-data posisi PDB negara-negara maupun posisi jumlah nilai perdagangan antarnegara di dunia, memang ketujuh negara industri maju itu memegang posisi puncak dan sebagai kunci dalam "mengendalikan" perekonomian dunia. Ini berarti bahwa dengan meninjau dan menilai perkembangan ekonomi dan perdagangan ketujuh negara industri maju itu sudah "mewakili" bagi gambaran posisi dan perkembangan perekonomian dunia. Naik-turunnya perekonomian dan perdagangan negara-negara Kelompok Tujuh itu sudah mencerminkan kecenderungan perkembangan dan arah pengaruhnya pada perekonomian secara keseluruhannya.

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DUNIA

Sejak tahun 1983 perekonomian dunia telah mulai dalam proses pemulihan kembali dari masa resesinya dan menjadi lebih mantap pada tahun 1984. Akan tetapi pada tahun 1985 terjadi kembali kelesuan dan pertumbuhan yang lambat. Jika dalam dasawarsa 1970-an terjadi stagflasi yaitu inflasi yang tinggi tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang disertai pula dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Keadaan ini bertentangan dengan teori Philips yang mengemukakan adanya "trade-off" antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Maka pada tahun-tahun terakhir ini ditemui adanya laju pertumbuhan ekonomi dunia yang relatif rendah disertai dengan tingkat inflasi yang rendah tetapi dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Kenyataan ini tampaknya agak mendukung teori Philips tersebut. Dalam hubungan ini, suatu pertumbuhan ekonomi yang baik dan perlu diusahakan adalah di mana laju pertumbuhannya menjadi lebih tinggi dengan dapat terkendalikannya tingkat inflasi yang rendah dengan disertai tingkat pengangguran yang rendah pula.

Negara-negara industri maju dalam proses pemulihannya sudah tahun keempat setelah keluar dari resesi berat yang terakhir, akan tetapi laju pertumbuhan ekonominya belum lagi stabil dan mantap. Secara totalitas rata-rata pertumbuhan ekonomi ketujuh negara industri maju itu telah meningkat dari 2,2% (1983) menjadi 3,9% (1984), akan tetapi melemah kembali menjadi kira-kira 2,6% pada tahun 1985. Dan diperkirakan pada tahun 1986 pertumbuhan ekonomi itu agak sedikit meningkat, yaitu menjadi rata-rata 2,7% (lihat Tabel 1). Gejala umum berupa proses pemulihan yang mulai berlangsung pada tahun 1983 kemudian meningkat cukup pesat tahun 1984 dan selanjutnya berjalan dengan lambat kembali pada tahun 1985, dan diharapkan akan sedikit meningkat pada tahun 1986 tampaknya berlaku agak menyeluruh pada negara-negara industri, khususnya pada negara-negara industri utama yang tergabung dalam Kelompok Tujuh tersebut.

Jika diperhatikan dengan lebih terperinci tampak bahwa laju pertumbuhan ekonomi negara-negara Jerman Barat, Prancis dan Italia pada tahun 1983 adalah sangat kecil, yaitu berada di bawah rata-rata pertumbuhan keseluruhannya, bahkan Italia mengalami pertumbuhan yang negatif pada tahun itu. Namun demikian kebanyakan negara-negara Kelompok Tujuh itu mengalami pertumbuhan yang cukup besar pada tahun 1984, kecuali Inggris yang mengalami penurunan dalam pertumbuhan ekonominya pada waktu itu. Selanjutnya, kecuali Jepang yang mengalami pertumbuhan yang cukup mantap, maka pada tahun 1985-1986 negara-negara industri maju itu mengalami pertumbuhan yang relatif agak lambat, yaitu hanya berada antara 2-3,5% dengan rata-rata sebesar 2,6-2,7% per tahun.

Tabel 1

LAJU PERTUMBUHAN, NERACA BERJALAN, INFLASI DAN PENGANGGURAN DI
NEGARA-NEGARA INDUSTRI UTAMA, 1983-1986

Beberapa Indikator/ Tahun	Amerika Serikat	Jepang	Jerman Barat	Prancis	Inggris	Italia	Kanada	Rata-rata
<i>Laju Pertumbuhan</i> (PDB Riil %)								
1983	3,7	3,4	1,5	0,7	3,2	-0,4	3,3	2,2
1984	6,8	5,8	2,7	1,6	2,6	2,6	5,2	3,9
1985	2½	5	2¼	1	2¼	2¼	2¾	2,6
1986	2¾	3½	3¼	2	2½	2½	2¾	2,7
<i>Neraca Berjalan</i> (US\$ milyar)								
1983	-40,8	20,8	4,1	-4,4	-4,8	0,8	1,4	-1,9
1984	-101,5	35,0	6,3	-0,8	1,5	-3,0	2,0	-8,6
1985	-128¼	47½	12¾	¾	4¼	-7¼	0	-10,0
1986	-146	57¼	20¼	3½	5	-5¼	-1	-9,5
<i>Tingkat Inflasi</i> (perubahan IHK %)								
1983	3,2	1,9	3,3	9,6	4,6	14,6	5,9	6,2
1984	4,3	2,2	2,4	7,4	5,0	10,6	4,3	5,2
1985	3	2½	2¼	5,8	6,0	4,0	4,0	4,2
1986	3¼	2½	1¼	4¼	4½	4½	4½	3,6
<i>Tingkat Pengangguran</i> (% terhadap angkatan kerja)								
1983	9,6	2,7	8,2	8,4	11,6	9,8	11,9	8,9
1984	7,5	2,7	8,2	9,9	11,7	10,3	11,3	8,8
1985	7¼	2½	8¼	10¼	11¼	10¾	10½	8,6
1986	7¼	2¾	8	8	11½	10½	9¾	8,2

Catatan: Untuk tahun 1985 dan 1986 adalah angka-angka perkiraan.

Sumber: 1. OECD, *OECD Economic Outlook*, No. 38, Desember 1985.

2. Bank Indonesia, *Laporan Tahunan 1984/1985*.

3. IMF, *IMF Survey*, 3 Maret 1986.

Mengenai perdagangan luar negeri negara-negara industri maju itu dapat dilihat pula dari segi lain, yaitu dari sudut neraca berjalannya masing-masing. Selama periode tahun 1983-1986 tiga negara yaitu Jerman Barat, Jepang dan Inggris selalu mengalami surplus dalam neraca berjalannya, di mana Jepang dan Jerman Barat pada dua tahun terakhir ini mengalami surplus yang meningkat dengan cepat. Sebaliknya Amerika Serikat selalu mengalami defisit yang besar dalam neraca berjalannya, bahkan semakin meningkat pada dua

tahun terakhir ini, terutama sebagai akibat kurang seimbangya perdagangan antara Amerika Serikat dengan kedua negara Jepang dan Jerman Barat tersebut. Sedangkan Italia, Prancis dan Kanada hampir selalu mengalami defisit atau seimbang atau dengan surplus yang kecil saja dalam neraca berjalannya pada tahun-tahun belakangan ini.

Dalam periode tahun 1983-1986 Jepang adalah satu-satunya negara yang selalu mengalami tingkat inflasi yang rendah sekaligus tingkat penganggurannya juga rendah. Amerika Serikat, Jerman Barat, Inggris dan Kanada pada umumnya mengalami tingkat inflasi yang relatif rendah akan tetapi dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Hal ini agak mirip dengan kondisi teori Phillips sebagaimana yang dikemukakan di atas. Prancis dan Italia adalah dua negara yang tingkat inflasi maupun tingkat penganggurannya cukup tinggi, namun demikian tingkat inflasi Italia pada dua tahun terakhir ini diperkirakan mengalami penurunan yang cukup berarti.

Dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa tampaknya perkembangan perekonomian Amerika Serikat dan Jepang, dua negara yang paling dominan peranan dan pengaruhnya terhadap perekonomian dunia dan perekonomian negara-negara berkembang khususnya, pada tahun-tahun terakhir ini berjalan dan berkembang dalam kondisi yang berlainan satu sama lainnya. Di satu pihak, Amerika Serikat yang mengalami defisit yang besar dalam Anggaran Belanja negaranya disertai dengan defisit yang besar pula dalam neraca berjalannya. Sungguhpun dalam keadaan inflasi yang cukup rendah, tetapi disertai dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Di lain pihak, Jepang yang juga mengalami defisit di dalam anggaran belanja negaranya, tetapi diimbangi dengan tabungan dalam negeri yang besar serta surplus yang besar pula dalam neraca berjalannya. Demikian pula kondisi Jepang lainnya adalah lebih baik yaitu tingkat inflasinya relatif lebih rendah serta tingkat penganggurannya juga rendah sebagaimana yang dikemukakan di atas.

Selanjutnya perlu ditinjau secara khusus mengenai keadaan perkembangan perekonomian dan kebijaksanaan perekonomian Amerika Serikat. Defisit yang besar dalam neraca berjalan Amerika Serikat berkaitan erat dengan nilai dollar yang tinggi di masa lalu terutama akibat mengalirnya arus dana yang besar dari luar Amerika Serikat. Kebutuhan dana yang besar untuk menutup anggaran belanja negara serta tingkat bunga yang tinggi telah menarik masuknya dollar dari luar Amerika Serikat dalam jumlah yang besar sekali. Akan tetapi akhir-akhir ini dollar Amerika Serikat sudah mulai melemah, khususnya terhadap mata uang partner dagang utamanya seperti Jepang dan Jerman Barat. Melemahnya dollar Amerika Serikat antara lain berkaitan dan berakibat turunnya tingkat bunga di Amerika Serikat yang menular pula pada negara-negara lainnya, di samping selalu membengkaknya defisit neraca pembayarannya.

Rupa-rupanya perkembangan perekonomian Amerika Serikat sebagaimana yang dikemukakan di atas disadari terutama adalah berpangkal pada defisit anggaran belanja federal Amerika Serikat yang besar. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Gramm-Rudman Act Pemerintah Amerika Serikat harus mengurangi defisit anggaran belanja federal setiap tahun sehingga menjadi hilang dan mencapai anggaran berimbang pada tahun 1991. Dalam IMF Survey 17 Februari 1986, Pemerintah Amerika Serikat tampaknya sudah mulai merencanakan menekan defisit anggaran belanjanya. Jika pada tahun anggaran 1986 defisit anggaran belanja negara sebesar US\$202,8 milyar yang berarti masih lebih besar dari target Gramm-Rudman (US\$171,9 milyar), maka pada pengajuan anggaran belanja federal ke Kongres untuk tahun anggaran 1987 pemerintahnya mengusulkan anggaran sebesar US\$143,6 milyar, yang berarti lebih rendah dari target menurut undang-undang yang berjumlah sebesar US\$144,0 milyar. Bahkan pengurangan rencana anggaran Pemerintah Amerika Serikat itu telah diusulkan semakin ditekan setiap tahun, sehingga pada tahun anggaran 1991 tidak hanya diusulkan anggaran berimbang, akan tetapi bahkan ditargetkan akan dicapai sekedar surplus sebesar US\$1,3 milyar. Dikemukakan oleh Pemerintah Reagan bahwa rencana untuk mencapai target penurunan defisit itu akan dilakukan melalui pengurangan dalam pengeluaran, bukan melalui peningkatan penerimaan pajak. Namun demikian, pengeluaran untuk program pertahanan dan keamanan nasional serta program kesejahteraan sosial tidak akan mengalami penurunan, dan yang ditekan atau diturunkan terutama berupa penghapusan program bantuan kredit pada perusahaan kecil, penghentian subsidi federal terhadap perusahaan angkutan kereta api, dan sebagainya. Adanya kebijaksanaan pemerintah ini kelihatannya didasarkan pada pandangan ekonomi Keynesian yaitu melakukan kebijaksanaan anggaran yang defisit pada keadaan perekonomian yang menurun dan resesi untuk kemudian akan diimbangi dan ditutup dengan surplus pada masa perekonomian sudah pulih dan makmur kembali. Sungguhpun demikian, dalam meningkatkan pertumbuhannya, Amerika Serikat masih menghadapi tugas dan beban berat akibat defisit anggaran belanja serta defisit neraca pembayarannya, sehingga pertumbuhan tersebut diperkirakan hanya akan meningkat pada tingkat yang moderat (sedang) saja pada tahun 1986 dan tahun berikutnya dibandingkan dengan tahun 1984 yang lalu.

PERKEMBANGAN PERDAGANGAN ANTARNEGARA

Keadaan dan perkembangan pertumbuhan ekonomi dunia, khususnya pada negara-negara industri maju itu, jelas mempunyai dampak dan keterkaitan yang besar dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Pengaruh itu akan tampak pada perkembangan perdagangan antarnegara.

Menurut laporan GATT (*IMF Survey*, 19 Mei 1986) volume ekspor barang dunia pada tahun 1985 telah meningkat sebesar 3%, yaitu lebih rendah dari pada tahun 1984 yang peningkatannya kira-kira 9%. Peningkatan volume perdagangan ini terjadi semata-mata karena pertumbuhan ekspor barang-barang manufaktur, sedangkan volume perdagangan barang-barang pertanian dan pertambangan mengalami penurunan.

Sungguhpun telah terjadi peningkatan volume ekspor sekedarnya itu, tetapi akibat penurunan harga barang yang diperdagangkan pada umumnya di pasaran dunia, maka nilai ekspor dunia adalah sebesar US\$1.910 milyar pada tahun 1985, yang berarti hanya kurang dari 1% di atas nilai tahun 1984. Demikian pula nilai impor, yang peningkatannya pada tahun 1985 lebih rendah dari pada tahun 1984, hanyalah mencapai sebesar US\$1.990 milyar. Untuk jelasnya lihat Tabel 2.

Tabel 2

**NILAI PERDAGANGAN BARANG DUNIA
MENURUT KELOMPOK BESAR NEGARA-NEGARA
(US\$ milyar dan %)**

Kelompok Besar Negara-negara	Ekspor (f.o.b)			Impor (c.i.f)		
	Nilai 1985	Perubahan Terhadap Tahun Sebelumnya		Nilai 1985	Perubahan Terhadap Tahun Sebelumnya	
		1984	1985		1984	1985
Negara-negara Industri	1.230	6½	3	1.333	8½	3
Negara-negara Berkembang	440	4	-5	410	-1½	-6½
Negara-negara Sosialis	202	2½	-3½	205	3½	5
Total dunia*	1.910	5½	½	1.990	5½	½

*Termasuk Australia, Selandia Baru dan Afrika Selatan yang tidak dimasukkan ke dalam salah satu kelompok besar negara-negara tersebut di atas.

Sumber: IMF, *IMF Survey*, 19 Mei 1986.

Dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa tingkat pertumbuhan perdagangan dunia pada tahun 1985 telah menurun dibandingkan dengan pada tahun 1984. Jika pada tahun 1984 nilai ekspor dan impor meningkat masing-masing sebesar 5%, maka pada tahun 1985 nilai ekspor dan impor itu meningkat masing-masing hanya sebesar ½%. Pertumbuhan yang rendah dalam nilai perdagangan pada tahun yang lalu itu diakibatkan oleh penurunan yang cukup besar dalam pertumbuhan perdagangan ekspor dan impor negara-negara berkembang dan negara-negara industri. Sedangkan pada negara-negara

tingkat perkembangan impornya untuk tahun 1985 lebih meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama karena peningkatan yang besar dalam pembelian barang impor oleh RRC.

Relatif buruknya performance perdagangan negara-negara berkembang pada tahun 1985 jelas tampak pada negara-negara Asia Tenggara. Dapat dikemukakan di sini bahwa kelemahan dalam perdagangan negara-negara Asia Tenggara ini disebabkan oleh karena terjadinya penurunan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat, Eropa Barat dan Jepang. Di samping itu juga pertumbuhan yang membalik dan merugikan dalam pasaran minyak bumi telah mempengaruhi negara-negara ini seperti Indonesia, perkembangan membalik yang merugikan dalam pasaran timah, karet dan gula berpengaruh pada Malaysia dan Filipina, penurunan kemampuan bersaing dan kelemahan segi ongkos mempengaruhi Singapura, dan ketidakpastian tentang kebijaksanaan perdagangan di masa-depan juga mempengaruhi kebanyakan negara Asia Tenggara tersebut.

Namun demikian, menurut GATT, penurunan tingkat pertumbuhan perdagangan yang terjadi tahun lalu itu diperkirakan hanya bersifat sementara, yaitu "istirahat sejenak" setelah berlangsungnya pertumbuhan perdagangan dunia yang cukup pesat pada tahun 1984. Dan ini selanjutnya diperkirakan akan diikuti oleh percepatan kembali dalam pertumbuhannya pada tahun 1986 ini. Dikemukakannya bahwa jika memang terjadi peningkatan secara moderat di dalam laju pertumbuhan ekonomi negara-negara industri pada tahun 1986, maka diperkirakan volume perdagangan dunia akan meningkat antara 4-5% pada tahun 1986 ini.

PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA

Pada tahun-tahun pertama Repelita III perkembangan internasional cukup menggembirakan dan menguntungkan bagi perekonomian Indonesia, seperti terjadinya kenaikan harga minyak bumi, kenaikan harga berbagai komoditi ekspor non-migas dan sebagainya. Sebagai akibat dari perkembangan ini, di samping karena hasil-hasil pembangunan nasional, selama tiga tahun pertama Repelita III, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yaitu rata-rata 8,0% tiap tahun. Sungguhpun terdapat tendensi penurunannya, selama tiga tahun Repelita III itu negara kita telah mampu meningkatkan dana APBN rata-rata 38,4% per tahun dan dana pembiayaan pembangunan rata-rata 40,0% per tahun. Di samping itu uang beredar juga meningkat rata-rata 34,3% per tahun, yang disertai pula dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi yaitu rata-rata 14,9% tiap tahun, dengan catatan pada tahun 1981/1982 tingkat inflasi itu sudah satu digit, yaitu hanya 9,80%. Lihat terperinci pada Tabel 3.

Tabel 3

**BEBERAPA INDIKATOR PERKEMBANGAN EKONOMI DAN
MONETER INDONESIA, 1979/80-1986/87**

(dalam %)

Tahun	Perubahan Total APBN	Perubahan Dana Pembangunan	Perubahan Uang Beredar	Tingkat Inflasi	Pertumbuhan PDB Riil ^a
1979/80	+ 51,5	+ 55,2	+ 35,6	19,13	6,3
1980/81	+ 45,0	+ 47,4	+ 37,3	15,85	9,9
1981/82	+ 18,8	+ 17,3	+ 29,9	9,80	7,9
1982/83	+ 3,1	+ 6,0	+ 8,9	8,40	2,2
1983/84	+ 27,5	+ 34,5	+ 9,2	12,63	4,2
1984/85	+ 5,8	+ 0,5	+ 11,6	3,64	5,8
1985/86	+ 18,9	+ 7,0	+ 16,5 ^b	5,16 ^b	2,0 ^d
1986/87	- 15,9 ^c (- 7,0)	- 55,0 ^c (- 22,1)	+ 11,5 ^c	4,39 ^c	1,4 ^c

Keterangan:

^aKhusus mengenai PDB di sini adalah menurut tahun kalender, dihitung atas dasar harga konstan 1973 dan mulai tahun 1984 atas dasar harga konstan 1983.

^bPrakiraan penulis yang didasarkan data Bank Indonesia atas dasar perkembangan bulanan sebelumnya.

^cPrakiraan penulis dengan asumsi tidak ada perubahan yang mendasar dalam kebijaksanaan moneter dan anggaran negara, dan asumsi harga minyak rata-rata US\$17,5 per barrel untuk tahun 1986/87. Angka di antara tanda kurung adalah angka RAPBN.

^dAngka yang dikemukakan Menko Ekuin Ali Wardhana (*Kompas*, 19 Juni 1986) yang diperkirakan cukup logis.

^eAngka prakiraan penulis dengan memperhitungkan faktor-faktor penurunan harga minyak bumi, penurunan APBN dan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya.

Sumber:

Bank Indonesia, *Laporan Tahunan 1984/1985* dan *Laporan Mingguan* No. 1417 (3 Juli 1986), serta Republik Indonesia, *Bahan tentang Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 1986/1987*, dengan catatan sebagian angka-angka dihitung dan diperkirakan sendiri.

Namun demikian perkembangan internasional berikutnya diikuti dengan timbulnya resesi dan krisis ekonomi dunia yang lebih parah dan berkepanjangan, di mana kegiatan ekonomi dan perdagangan dunia merosot, pengangguran meningkat dan inflasi relatif melonjak. Dan tambahan pula terdapat gejolak-gejolak dalam kurs mata uang utama serta tingkat bunga di dunia internasional. Perkembangan yang buruk ini memberikan dampak yang negatif dan buruk terhadap perekonomian dalam negeri yang sukar untuk dibendung. Selama dua tahun terakhir Repelita III dan tahun pertama Repelita IV negara kita terpaksa melaksanakan kebijaksanaan penghematan dan "pengencangan ikat pinggang."

Sebagaimana halnya pada perkembangan ekonomi dunia yang dikemukakan sebelumnya, maka ada analisa yang memperkirakan perekonomian Indonesia akan mengikuti arus gelombang dan pola yang seirama pula. Jika pada tahun 1983 dan kemudian berlanjut pada tahun 1984 pertumbuhan ekonomi telah mulai (dan semakin) meningkat, maka pada tahun 1985 diperkirakan merosot kembali. Menurut *The Asian Wall Street Journal* pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun itu merosot kembali menjadi 2,4% dan pada tahun 1986 agak sedikit meningkat kembali yaitu menjadi sebesar 3,6%.² Akan tetapi menurut Bank Dunia laju pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 1985 itu hanya sebesar 1,1% (*Kompas*, 14 Juni 1986), sedangkan menurut Menko Ekuin Ali Wardhana pertumbuhan itu agak sedikit lebih tinggi, yaitu 2,0% (*Kompas*, 19 Juni 1986), yang menurut penulis angka inilah yang cukup logis dan lebih tepat. Hal yang demikian ini terjadi terutama sebagai akibat dari kemerosotan harga minyak bumi, kemerosotan ekonomi dan perdagangan dunia, hambatan proteksi dari negara-negara industri dan kelesuan kegiatan ekonomi nasional pada tahun tersebut.

Melihat pengalaman dan perkembangan komponen-komponen yang membawa pertumbuhan ekonomi di masa lalu, terutama anggaran belanja negara, pada tahun 1986/87 ini menjadi sangat merosot, maka diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1986 ini sudah jelas tidaklah akan mencapai angka perkiraan *The Asian Wall Street Journal* sebesar 3,6% tersebut di atas. Dan menurut World Bank hanya akan mencapai angka di bawah 2,0% pada tahun 1986 tersebut. Sedangkan menurut penulis berdasarkan atas perhitungan anjloknya harga minyak bumi sejak awal 1986, penurunan anggaran belanja negara yang jauh lebih besar lagi dari yang tercantum dalam RAPBN serta rendahnya pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya, maka pada tahun 1986 pertumbuhan ekonomi kita hanya akan mencapai kira-kira 1,4%.

Sektor pemerintah melalui APBN yang diharapkan akan dapat menerobos kelesuan ekonomi dan lemahnya permintaan efektif dewasa ini justru mengalami penurunan yang cukup besar, dan penurunan ini baru pertama kali terjadi sejak masa Orde Baru. Penurunan ini akan menjadi semakin lebih besar lagi (dibandingkan dengan angka RAPBN) sebagai akibat anjloknya harga minyak bumi di pasaran internasional sampai jauh di bawah US\$15 per barrel. Dengan perkiraan harga minyak yang optimis dan moderat saja pada tahun 1986/87 misalnya US\$17,5 per barrel, maka penerimaan negara dari minyak bumi akan turun sebesar Rp 2.444 milyar.³

²Lihat J. Panglaykim, "Pesan dari Pertemuan IMF dan Bank Dunia di Seoul: Pertumbuhan" dalam *Suara Karya*, 20 Januari 1986.

³Lihat tulisan Rustian Kamaluddin, "Penerapan Anggaran Berimbang dengan Sumber Dana Pengimbang Pinjaman Dalam dan Luar Negeri," *Forum Ekonomi*, Tahun V, No. 33, Juli 1986.

Tampaknya untuk mengatasi atau mengimbangi ketekoran ini pemerintah terutama hanya akan melakukan tindakan penghematan dan efisiensi, serta melakukan kebijaksanaan mendorong ekspor non-migas dan penanaman modal (lihat Paket Kebijakan 6 Mei 1986) yang keberhasilannya membutuhkan waktu dan sulit untuk dicapai dalam jangka pendek. Dan sebaliknya pemerintah enggan untuk melakukan tindakan deficit financing melalui pinjaman dalam negeri yang diduga akan dapat menimbulkan inflasi yang membahayakan. Sebetulnya sesuai dengan analisa penulis tambahan dana pembiayaan dan uang beredar sebesar maksimal Rp 2,5 trilyun untuk "menutup defisit" pada tahun 1986/87 ini tidaklah akan menimbulkan bahaya inflasi yang besar, paling-paling tingkat inflasi hanya akan mencapai sekitar 15%. Dan kebijaksanaan anggaran deficit dengan melalui pinjaman dalam negeri merupakan alternatif kebijaksanaan yang lebih tepat dan realistis yang terpaksa perlu dilakukan minimal untuk tahun ini dan tahun depan asal disertai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan lain untuk mendukung keberhasilan.

Dengan adanya penurunan APBN sebesar 7% dan penurunan dana pembangunan sebesar 22,1% menurut anggaran RAPBN atau penurunan APBN sebesar 15% dan penurunan dana pembangunan sebesar 55,0% menurut perkiraan moderat penulis pada tahun 1986/87 ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka dalam perekonomian yang serba lesu dan dengan permintaan efektif yang merosot di dalam masyarakat dewasa ini akan berakibat laju perekonomian bahkan lebih rendah dari pada tahun lalu, dengan taksiran moderat hanya sebesar 1,4% sebagaimana yang disebutkan di atas. Keadaan ini jelas akan membawa konsekuensi yang lebih berat dalam masalah PHK dan pengangguran serta kelesuan ekonomi lebih lanjut. Dan dengan demikian, selama tiga tahun pertama periode Repelita IV ini laju pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan akan dapat dicapai hanya sebesar rata-rata 3,1% per tahun. Ini berarti kita tidak bisa mengejar ketinggalan kita dalam memacu laju pertumbuhan yang lebih tinggi, seharusnya di atas 5%, agar supaya target rata-rata sebesar 5% selama Repelita IV ini dapat dicapai. Tampaknya diperlukan keberanian pemerintah untuk mencoba mengambil kebijaksanaan anggaran negara yang tidak lagi konservatif (dengan deficit financing) dalam arti agak sedikit menyimpang dari ketentuan dan kelaziman yang berlaku selama ini.